

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Raihasasukses.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, 2015, *Awat Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta, PustakaYustisia.
- Bagir Manan, 2002, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas HukumUnpad.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Djambatan.
- H.M. Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Harapan.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sangsun SP Florianus, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta, Visimedia.
- Sudjito, 1987, *PRONA (Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis)*, Yogyakarta, Liberty.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta, SinarGrafika.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali

\_\_\_ , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.

### **Peraturan perundang – undangan yang berlaku**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**Website**

[www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses pada tanggal 30 Agustus 2017

[www.padangpariamankab.bps.go.id](http://www.padangpariamankab.bps.go.id), diakses pada tanggal 10 November 2017

